



**LAPORAN BADAN ANGGARAN DPR RI  
MENGENAI  
HASIL PEMBICARAAN TK.I/PEMBAHASAN  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**Disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI  
Tanggal 29 September 2020**

**Oleh:  
Ketua Badan Anggaran DPR RI  
MH. Said Abdullah  
Nomor Anggota : A-224**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
LAPORAN BADAN ANGGARAN DPR RI  
MENGENAI HASIL PEMBICARAAN TINGKAT I/PEMBAHASAN  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2021 BESERTA NOTA KEUANGANNYA  
*Selasa, 29 September 2020*

---

*Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,  
Selamat Siang, salam sejahtera buat kita semua,  
Om Swastiastu Namu Budhaya, dan  
Salam Kebajikan.*

*Yth. Saudara Ketua, Pimpinan dan Anggota Dewan,  
Yth. Saudari Menteri Keuangan RI,  
Yth. Saudara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Bappenas,  
Yth. Saudara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan  
Hadirin sekalian yang berbahagia.*

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas perkenan dan ridho-Nya kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna hari ini dalam rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2021 (RUU APBN TA 2021) beserta Nota Keuangannya.

*Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,*

Sebelum kami membacakan laporan, perlu kami sampaikan bahwa dalam laporan kami ini hanya berisi pokok-pokok hasil pembahasan RUU APBN TA 2021. Sedangkan laporan-laporan panja akan disusun menjadi kesimpulan pembahasan, pendapat akhir mini fraksi-fraksi, pendapat pemerintah, dan draft akhir naskah RUU APBN TA 2021 tidak kami bacakan, tetapi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.

*Sidang Dewan yang Terhormat,*

Melalui surat Presiden Nomor: R-35/Pres/08/2020, tanggal 13 Agustus 2020, perihal RUU tentang APBN TA 2021 kepada Ketua DPR RI, Pemerintah mengajukan RUU tentang APBN TA 2021 untuk dibahas bersama DPR, sekaligus

menugaskan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Menteri Hukum dan HAM sebagai Wakil Pemerintah baik secara sendiri maupun bersama.

Sehubungan dengan pengajuan tersebut, Presiden telah menyampaikan Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU APBN TA 2021 dalam Rapat Paripurna tanggal 14 Agustus 2020. Fraksi - Fraksi juga telah menyampaikan pandangannya atas RUU tersebut dalam Rapat Paripurna tanggal 25 Agustus 2020, dilanjutkan dengan Jawaban Pemerintah atas pandangan Fraksi dalam Rapat Paripurna tanggal 1 September 2020.

Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, RUU APBN dibahas oleh Badan Anggaran sebagai pelaksana dari fungsi anggaran yang dimiliki Dewan. Atas dasar itulah maka Badan Anggaran melaksanakan Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang APBN TA 2021 bersama Pemerintah.

***Sidang Dewan yang kami muliakan,***

Badan Anggaran telah melakukan pembahasan RUU tentang APBN TA 2021 mulai tanggal 1-25 September 2020, yaitu:

1. Tanggal 1 September 2020, Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Pemerintah dan Bank Indonesia, untuk menyampaikan pokok-pokok RUU APBN TA 2021, sekaligus pembentukan panja-panja;
2. Tanggal 2-15 September 2020, Rapat Kerja Komisi VII dan Komisi XI membahas asumsi dasar, dan seluruh Komisi membahas RKA-K/L Tahun 2021 mitra kerjanya;
3. Tanggal 8 September 2020, pembahasan RKA-K/L tahun 2021 dari Kemenko-Kemenko di Badan Anggaran;
4. Tanggal 9-10 September 2020, Rapat Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan RUU APBN TA 2021;
5. Tanggal 11 September 2020, Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Pemerintah dan Bank Indonesia untuk membahas dan menetapkan Postur Sementara RAPBN 2021;
6. Tanggal 14-15 September 2020, Rapat Panja Transfer ke Daerah dan Dana Desa RUU APBN TA 2021;
7. Tanggal 16 September 2020, Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat RUU APBN TA 2021;
8. Tanggal 17-23 September 2020, Rapat Kerja Komisi-Komisi dengan Mitra Kerjanya untuk penetapan RKA-K/L Tahun 2021 berdasarkan hasil pembahasan di Badan Anggaran;
9. Tanggal 21 September 2020, Rapat-rapat Tim Perumus dari Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan, Panja Belanja Pemerintah Pusat, dan Panja Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

10. Tanggal 22 September 2020, Rapat Panja Draft RUU dan Rapat Tim Perumus Draft RUU APBN TA 2021;
11. Tanggal 24 September 2020, Rapat Internal Badan Anggaran, dan Rapat Konsultasi dengan Pimpinan Dewan, dan
12. Tanggal 25 September 2020, Rapat Kerja dengan Pemerintah dan Bank Indonesia untuk Pengambilan Keputusan atas RUU APBN TA 2021 di Tingkat I.

Kami sampaikan juga bahwa dalam pembahasan RUU APBN TA 2021 ini Badan Anggaran dengan Pemerintah, telah memperhatikan **Keputusan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Nomor 5/DPD RI/I/2020-2021** tentang APBN TA 2021, yang disampaikan melalui Pimpinan DPR, pada tanggal 22 September 2020.

***Pimpinan, Para Anggota dan hadirin yang terhormat,***

Berikut kami akan menyampaikan Pendapat Akhir Mini Fraksi sebagai sikap akhir fraksi atas RUU APBN TA 2021 yang disampaikan dalam rapat kerja di Badan Anggaran, namun kami tidak menyampaikannya secara lengkap, melainkan hanya beberapa pendapat dari setiap fraksi, yaitu:

**Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Fraksi PDI Perjuangan)** berpendapat APBN TA 2021 berisikan rancangan kebijakan fiskal yang komprehensif, baik di bidang pendapatan dan belanja negara, maupun pembiayaan anggaran untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. Dalam menjalankan kebijakan fiskal APBN TA 2021, agar Pemerintah memperhatikan (1) manajemen risiko fiskal atas penerimaan pajak yang tidak dapat mencapai target agar dapat disertai dengan kebijakan penyesuaian belanja, sehingga tidak menambah pembiayaan melalui utang; (2) memperkuat pelaksanaan belanja K/L yang ditunjukkan dengan kinerja *output*, *outcome* dan *result based*, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada rakyat yang meliputi kemudahan layanan, ketepatan waktu, biaya yang terjangkau, responsive, dan akses yang mudah; (3) pengendalian defisit tahun 2021, yang menyangkut konsolidasi fiskal di tahun 2023, tetap memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan menjaga ruang fiskal dan keberlanjutan APBN, dan (4) dalam hal pengurusan kekayaan negara yang dipisahkan, dan dikelola oleh BUMN atau badan lainnya, Pemerintah dengan kewenangannya agar meningkatkan dan mengoptimalkan manfaat ekonomi, sosial, memperkuat rantai produksi dalam negeri, meningkatkan daya saing, serta memperkuat penguasaan pasar dalam negeri.

**Fraksi Partai Golongan Karya (Fraksi Partai Golkar)** memberikan 7 (tujuh) catatan, antara lain Fraksi Partai Golkar mengapresiasi optimisme Pemerintah

dalam menetapkan asumsi dasar ekonomi tahun 2021. Namun Fraksi Partai Golkar berpandangan, penurunan target perpajakan diperlukan untuk mendukung relaksasi perpajakan dalam rangka memberikan stimulus pada perekonomian serta antisipasi terhadap risiko *shortfall* penerimaan. Untuk menghindari risiko *shortfall* yang lebih dalam, Fraksi Partai Golkar mendukung Pemerintah untuk melakukan perluasan basis pajak pada sektor yang selama ini belum tersentuh seperti ekonomi digital serta sumber-sumber potensi penerimaan lainnya. Namun demikian, ekstensifikasi perpajakan tersebut sedapat mungkin tidak menyasar sektor UMKM serta masyarakat golongan menengah ke bawah. Selain itu, Fraksi Partai Golkar mendorong skema *burden sharing* antara Pemerintah dan Bank Indonesia untuk dilanjutkan hingga tahun 2023. Agar pelaksanaan tersebut harus disertai dengan mitigasi risiko yang seksama di pasar keuangan, khususnya di pasar SBN. Fraksi Partai Golkar juga meminta kepada Pemerintah dan Bank Indonesia agar terus mengupayakan bauran kebijakan fiskal dan moneter yang lebih efektif dan efisien dalam menghadapi pandemi beserta dampak-dampaknya.

**Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Fraksi Partai Gerindra)** memberikan 8 (delapan) catatan atas RUU APBN TA 2021, diantaranya adalah Fraksi Partai Gerindra mendorong Pemerintah agar tetap fokus pada efektifitas anggaran penanganan dari dampak Covid-19 dengan prioritas kesehatan masyarakat, pendidikan, kedaulatan pangan dan perlindungan sosial untuk menekan laju kemiskinan dan pengangguran, dalam rangka akselerasi program pemulihan ekonomi nasional yang tepat guna dan tepat sasaran. Selain itu, dalam pemanfaatan anggaran agar Pemerintah harus sungguh-sungguh berorientasi pada terwujudnya kedaulatan pangan, energi dan air. Orientasi itu tidak boleh terpisah dari tujuan memperkokoh ketahanan ekonomi nasional yang terintegrasi dengan postur dan struktur sistem pertahanan dan keamanan nasional. Selanjutnya dalam mencari sumber pembiayaan tidak cukup hanya melakukan secara hati-hati dan efisien melalui penguatan kuasi fiskal. Pemerintah harus mencari alternatif solusi agar bisa keluar dari praktik pembiayaan utang yang membawa kita pada siklus berutang untuk membayar utang.

**Fraksi Partai Nasional Demokrat (Fraksi Partai Nasdem)** memberikan 14 (empat belas) catatan, antara lain Fraksi Partai Nasdem meminta kepada Pemerintah untuk mendorong berbagai upaya agar sektor hulu migas dapat tetap memproduksi sesuai dengan tingkat potensinya. Dan menggiatkan eksplorasi pada wilayah cengkungan baru dalam upaya mempercepat realisasi cadangan sumber daya. Fraksi Partai Nasdem mendukung kebijakan Pemerintah dalam upaya mengoptimalkan kontribusi PNBPN dalam APBN disertai dengan pengelolaan yang

lebih produktif. Dengan demikian penerimaan negara dari sektor pajak dapat diselesaikan dengan koordinasi yang baik antara pemangku kepentingan. Fraksi Partai Nasdem juga mengingatkan Pemerintah terkait dengan postur PMN kepada BUMN harus sesuai dengan perencanaan, alokasi dan tujuan. Fraksi Partai Nasdem berpendapat bahwa PMN harus diberikan kepada BUMN yang sehat dan baik kinerjanya sehingga pemberian dana PMN itu sesuai dengan tujuan awalnya.

**Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (Fraksi PKB)** memberikan 10 (sepuluh) catatan penting diantaranya Fraksi PKB terus mendesak Pemerintah agar konsekuen melaksanakan ketentuan UU No.18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang menyatakan bahwa salah satu fungsi pesantren adalah menyelenggarakan fungsi pendidikan sehingga dapat diakui sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional dan berhak menerima alokasi anggaran pendidikan yang berasal dari *mandatory spending* anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN. Selanjutnya Fraksi PKB memandang subsidi pupuk harus dapat dipastikan dapat memenuhi kebutuhan petani, sehingga tidak terjadi lagi kelangkaan pupuk di daerah. Oleh karena itu Fraksi PKB mendesak Pemerintah mempercepat melakukan penyempurnaan data petani e-RDKK penerima subsidi dengan basis NIK, nama sesuai KTP, dan alamat (*by name by address*) dan juga efisiensi HPP pupuk.

**Fraksi Partai Demokrat** memberikan 8 (delapan) catatan kritis dan 3 (tiga) rekomendasi, yaitu antara lain meminta Pemerintah agar memastikan *government spending* agar tepat sasaran dan fokus pada penanganan Covid-19, sehingga alokasi belanja Pemerintah dapat lebih tajam dan optimal. Kemudian Fraksi Partai Demokrat meminta Pemerintah fokus terhadap upaya Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta menentukan prioritas lainnya agar benar-benar mampu mengurangi beban masyarakat baik dari sisi kesehatan, ekonomi dan sosial. Pelaksanaan Program PEN harus efektif, efisien dan tepat sasaran. Selain itu, Fraksi Partai Demokrat meminta Pemerintah agar mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran serta tetap menjaga *sustainable growth with equity* dan pelaksanaan program pro-rakyat, agar tercapai kemakmuran dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

**Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (Fraksi PKS)** memberikan 27 (dua puluh tujuh) pendapat dan rekomendasi, diantaranya Fraksi PKS berpendapat terkait kewenangan Pemerintah untuk melakukan refocusing, realokasi, dan pemotongan anggaran, perlu dibuat aturan main yang lebih jelas agar kebijakan tersebut bisa berjalan dengan efektif. Hal ini perlu dilakukan agar belanja pemerintah pusat pada tahun mendatang bisa diukur keberhasilannya, sehingga belanja pemerintah pusat bisa lebih efisien dan efektif dalam meningkatkan pelayanan. Fraksi PKS berpendapat dan merekomendasikan agar subsidi listrik

untuk rakyat pengguna listrik 450 VA dan 900 VA terus dilanjutkan. Pemerintah juga harus menjamin akses listrik bagi rumah tangga miskin/rentan miskin/dan tidak atau kurang mampu dengan memberikan layanan pemasangan listrik 450 VA gratis. Fraksi PKS tidak sependapat dan tidak setuju pemberian PMN kepada PT BPUI (Persero), untuk penyelesaian kasus PT Jiwasraya (Persero). Permasalahan dalam kasus Jiwasraya diakibatkan adanya indikasi korupsi, *fraud*, dan *missmanagement*. Perampokan atas Jiwasraya harus diproses secara hukum, dan pihak-pihak yang terlibat harus bertanggung jawab menyelesaikan kewajibannya kepada nasabah. Pemberian PMN kepada Jiwasraya yang bersumber dari APBN merupakan pengalihan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat kepada rakyat Indonesia. Aset-aset Jiwasraya yang masih bisa diselamatkan, diprioritaskan untuk menyelesaikan kewajiban kepada nasabah "tradisional" Jiwasraya yang merupakan kumpulan orang dan para pensiunan bukan untuk nasabah *saving plan*.

**Fraksi Partai Amanat Nasional (Fraksi PAN)** memberikan 11 (sebelas) catatan antara lain, Fraksi PAN meminta agar penetapan target PNBPN harus didukung dengan berbagai kebijakan strategis yang dapat mengoptimalkan PNBPN seperti PNBPN SDA, dividen BUMN, PNBPN pada K/L, dan BLU. Selama ini dividen BUMN termasuk menjadi salah satu andalan bagi PNBPN, bahkan pada perioded 2015-2019 rata-rata pertumbuhan dividen bisa mencapai 4,65% per tahun. Namun dalam APBN TA 2021, dividen BUMN dipangkas cukup signifikan. Oleh karena itu Fraksi PAN mendorong agar kinerja BUMN bisa dimaksimalkan lagi sehingga kontribusinya terhadap APBN dapat meningkat lagi. Selain itu, juga agar Pemerintah segera menjalankan UU PNBPN yang baru. Selain itu, Fraksi PAN meminta agar Pemerintah bisa mengarahkan pemanfaatan TKDD untuk pemulihan dan penguatan ekonomi daerah terutama terhadap sektor-sektor yang mendukung penyerapan tenaga kerja dan investasi. Fraksi PAN juga mendorong agar dana desa tahun 2021 yang ditetapkan dapat difokuskan untuk beberapa program prioritas seperti padat karya tunai, pemberdayaan UMKM dan sektor usaha pertanian, transformasi ekonomi desa melalui desa digital, dan peningkatan BUMDes.

**Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (Fraksi PPP)** memberikan 13 (tiga belas) catatan diantaranya Fraksi PPP meminta Pemerintah menjaga optimisme, kinerja dan implementasi rumusan kebijakan Pemerintah yang mampu memberikan keyakinan kepada rakyat bahwa pertumbuhan itu mampu mensejahterakan, menciptakan pemerataan, menurunkan kemiskinan dan membuka banyak lapangan kerja dan indikator sosial lainnya semakin membaik. Kemudian terkait dengan cukai, Fraksi PPP menilai program ekstensifikasi objek barang kena cukai harus dilakukan secara berhati-hati dan melalui kajian yang

cukup mendalam, mengingat akan saling berkaitan antara harapan kenaikan pendapatan negara dengan tingkat kenaikan harga barang, tingkat konsumsi masyarakat dan dampak terhadap kinerja industri lainnya. Terhadap sektor pendidikan, Fraksi PPP meminta Pemerintah untuk mengawal, karena anggaran yang sedemikian besar setiap tahunnya, ternyata masih belum mampu memajukan kualitas sektor pendidikan. Indeks daya saing SDM, indeks daya saing perguruan tinggi, skor PISA (*Programme for International Student Assessment* atau Program Penilaian Pelajar Internasional) anak didik dan infrastruktur pendidikan masih jauh dari negara lain, baik level Asia maupun global. Pada sisi lain, kesejahteraan guru dan guru honorer masih memprihatinkan. Banyak juga guru-guru madrasah dan pesantren juga belum tersentuh oleh anggaran negara. Padahal, mereka memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan karakter dan moral bangsa.

Badan Anggaran meminta Pemerintah agar memperhatikan catatan-catatan dari seluruh Fraksi untuk menjadi koreksi yang konstruktif dalam pelaksanaan APBN TA 2021 dan APBN tahun-tahun berikutnya.

#### ***Pimpinan dan Sidang Dewan yang Terhormat,***

Berikut kami sampaikan pokok-pokok hasil pembahasan di Badan Anggaran dengan Pemerintah dan Bank Indonesia atas RUU APBN TA 2021, yaitu:

Asumsi Dasar dalam RUU APBN TA 2021 adalah:

No.	Asumsi Makro	RAPBN	Kesepakatan
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,5 – 5,5	5,0
2	Laju Inflasi (%)	3,0	3,0
3	Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)	14.600	14.600
4	Tingkat Suku Bunga SBN-10Tahun (%)	7,29	7,29
5	Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/Barel)	45	45
6	<i>Lifting</i> Minyak Bumi (ribu barel per hari)	705	705
7	<i>Lifting</i> Gas Bumi (ribu barel setara minyak per hari)	1.007	1.007

#### **Sasaran dan Indikator Pembangunan Tahun 2021**

No.	Indikator	RAPBN	Kesepakatan
<b>Sasaran Pembangunan</b>			
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,7 – 9,1	7,7 – 9,1
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	9,2 – 9,7	9,2 – 9,7
3.	Rasio Gini (indeks)	0,377 – 0,379	0,377 – 0,379
4.	Indeks Pembangunan Manusia (dengan perhitungan yang baru)	72,78 – 72,95	72,78 – 72,95
<b>Indikator Pembangunan</b>			
5.	Nilai Tukar Petani (NTP)	102	102 – 104
	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	104	102 – 104

Dengan asumsi dasar ekonomi makro yang telah disepakati maka Pendapatan Negara dalam APBN TA 2021 sebesar Rp1.743,65 triliun, yang terdiri dari Pendapatan Dalam Negeri sebesar Rp1.742,75 triliun dan Penerimaan Hibah sebesar Rp0,90 triliun.

Pendapatan Dalam Negeri terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.444,54 triliun (*tax ratio* sebesar 8,18% dari PDB) yang bersumber dari PPh sebesar Rp683,77 triliun, PPN sebesar Rp518,55 triliun, PBB sebesar Rp14,83 triliun, Cukai sebesar Rp180,0 triliun, Pajak Lainnya sebesar Rp12,43 triliun, dan Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp34,96 triliun. Sedangkan untuk PNBP sebesar Rp298,20 triliun bersumber dari Penerimaan SDA Migas sebesar Rp74,99 triliun, Penerimaan SDA Nonmigas sebesar Rp29,11 triliun, PNBP Lainnya sebesar Rp109,17 triliun, dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp58,79 triliun, serta Pendapatan Pemerintah dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan sebesar Rp26,13 triliun.

***Sidang Dewan yang Terhormat,***

Berikut kami akan menyampaikan dari sisi pengeluaran dalam RUU APBN TA 2021, yaitu Belanja Negara sebesar Rp2.750,0 triliun, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.954,5 triliun, dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp795,5 triliun.

Belanja Pemerintah Pusat tersebut terdiri dari:

1. Belanja K/L sebesar Rp1.031,96 triliun. Terhadap Belanja K/L, Badan Anggaran meminta Pemerintah untuk menyiapkan indikator-indikator yang dapat menunjukkan dampak langsung kepada masyarakat dari program-program prioritas di masing-masing K/L.
2. Belanja Non-K/L alokasi sebagai berikut:
  - 1) Program Pengelolaan Utang Negara sebesar Rp373,26 triliun terdiri dari pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp355,11 triliun dan pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp18,15 triliun.
  - 2) Program Pengelolaan Subsidi sebesar Rp175,35 triliun, terdiri atas subsidi energi sebesar Rp110,51 triliun dan subsidi non energi sebesar Rp64,84 triliun.

Anggaran program pengelolaan subsidi energi tersebut terdiri dari subsidi subsidi BBM dan LPG Tabung 3 Kg sebesar Rp56,92 triliun, dan subsidi listrik sebesar Rp53,59 triliun.

Terhadap kebijakan subsidi BBM dan LPG Tabung 3 Kg dalam tahun 2021, Pemerintah sudah mulai mendata masyarakat yang berhak untuk

menerima subsidi gas LPG tabung 3 kg dan terintegrasi dengan data masyarakat miskin (DTKS), sehingga di tahun 2022 subsidi disalurkan kepada orang, tidak kepada produk. Data tersebut sudah mulai dikumpulkan oleh Pemerintah sejak awal tahun, sehingga pada saat Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2022 data tersebut sudah tersedia dan dapat digunakan dalam pembuatan kebijakan. Sedangkan kebijakan subsidi listrik, diberikan secara tepat sasaran bagi seluruh pelanggan rumah tangga daya 450 VA dan rumah tangga miskin dan rentan miskin daya 900 VA dengan mengacu DTKS;

Sedangkan untuk Subsidi Non Energi akan dialokasikan untuk Subsidi pupuk sebesar Rp25,28 triliun; Subsidi/PSO sebesar Rp6,11 triliun; Subsidi bunga kredit program sebesar Rp21,70 triliun; dan Subsidi Pajak sebesar Rp11,75 triliun.

- 3) Program Pengelolaan Hibah Negara sebesar Rp6,78 triliun.
- 4) Program Pengelolaan Belanja Lainnya sebesar Rp223,78 triliun;
- 5) Program Pengelolaan Transaksi Khusus sebesar Rp143,41 triliun.

Dalam tahun 2021, Anggaran Pendidikan sebesar Rp550,01 triliun atau 20,0 persen dari total belanja negara yang terdiri atas (1) Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp184,54 triliun, (2) Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp299,06 triliun dan (3) Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp66,41 triliun, terdiri dari Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, dana abadi penelitian, dana abadi kebudayaan, serta dana abadi perguruan tinggi.

Sedangkan untuk Anggaran Kesehatan tahun 2021 sebesar Rp169,72 triliun atau 6,2 persen dari total belanja negara, yang dialokasikan dalam (1) Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp130,67 triliun, dan (2) Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp39,05 triliun.

#### ***Sidang Dewan yang kami muliakan,***

Untuk anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa dalam tahun 2021 sebesar Rp795,48 triliun, terdiri dari Transfer ke Daerah sebesar Rp723,48 triliun dan Dana Desa sebesar Rp72,0 triliun. Dana Transfer ke Daerah tersebut terdiri dari Dana Perimbangan sebesar Rp688,68 triliun, Dana Insentif Daerah sebesar Rp13,5 triliun, Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY sebesar Rp21,30 triliun.

Dana Perimbangan terdiri dari: 1) Dana Transfer Umum sebesar Rp492,25 triliun, meliputi Dana Bagi Hasil sebesar Rp101,96 triliun, dan Dana Alokasi Umum sebesar Rp390,29 triliun; 2) Dana Transfer Khusus sebesar Rp196,42

triliun, terdiri dari Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp65,25 triliun dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp131,18 triliun.

***Sidang Dewan yang terhormat,***

Dengan mencermati dinamika perekonomian baik global maupun domestik yang masih dibayangi ketidakpastian dan pentingnya untuk mendorong agar penanganan COVID-19 segera dapat diatasi, serta akselerasi pemulihan ekonomi maka defisit APBN TA 2021 disepakati sebesar 5,70 persen terhadap PDB atau sebesar Rp1.006,38 triliun. Untuk itu, pada tahun 2021 ditempuh kebijakan fiskal yang ekspansif-konsolidatif dalam rangka mendorong pengelolaan fiskal yang fleksibel, *prudent* dan *sustainable*, yang diikuti langkah konsolidasi fiskal secara bertahap.

Pembiayaan defisit 2021 tersebut akan bersumber dari:

1. Pembiayaan utang sebesar Rp1.177,35 triliun;
2. Pembiayaan investasi sebesar negatif Rp184,46 triliun;
3. Pemberian pinjaman sebesar Rp0,45 triliun;
4. Kewajiban penjaminan sebesar negatif Rp2,72 triliun, dan
5. Pembiayaan lainnya (SAL) sebesar Rp15,76 triliun.

***Sidang Dewan yang Mulia,***

Berikut kami laporkan Sikap Fraksi atas RUU APBN TA 2021 yang disampaikan dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah dan Bank Indonesia, yaitu:

1. Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi PPP menyetujui atau menerima RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2021 untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam rapat paripurna hari ini untuk disahkan menjadi undang-undang.
2. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menerima dengan catatan (*minderheid nota*) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir catatan atas RUU APBN TA 2021 untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam rapat paripurna.

***Pimpinan Dewan, Para Anggota dan hadirin yang berbahagia,***

Sebelum mengakhiri laporan ini, dalam masa pandemi Covid-19 dan agar kita cepat keluar dari tekanan ekonomi, kami ingin mengajak kita semua, meresapi dengan hening penggalan pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 yaitu ***“Gotong-royong adalah pembantingan-tulang bersama, pemerasan-keringat***

***bersama, perjuangan bantu binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Holopis kuntul baris buat kepentingan bersama! Itulah Gotong-Royong!***". Sepenggal pidato Bung Karno itu bukan firman yang beliau dapatkan dari langit. Perjalanan panjangnya menapaki garis perjuangan, melintasi berbagai suku, budaya dan agama ke seantero negeri menemukan gotong-royong adalah praktik budaya yang hidup di tengah-tengah rakyat. Kami melihat masih ada asa, gotong-royong masih hidup subur di sebagian rakyat kita.

Gotong-royong perlu kita gelorakan, kita nyalakan sebagai lampu penerang bukan centang perenang dalam pandemi. Tidak ada *haters* dan *lovers*, dinding-dinding pemisah diantara kita mari kita sudahi. Pemerintah perlu terbuka dan arif terhadap masukan, kelompok-kelompok masyarakat juga tidak banal dalam menyusun kritikan. Kami berharap pernyataan para pejabat juga meneduhkan, dan tidak merasa paling benar dalam tindakan.

Mari kita hadapi resesi dan pandemi dengan kerjasama dan *sense of crisis* yang sama diantara seluruh anak bangsa. Semua rakyat harus patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Pemerintah juga harus terus meningkatkan kemampuan tes, pelacakan, isolasi dan perawatan, serta mempersiapkan vaksin dengan baik sampai awal tahun depan. Kita juga harus fokus mengawal, agar serapan program belanja pembangunan dalam APBN tahun 2020 bisa dioptimalkan. Kita harus sepaham bahwa, dalam kondisi krisis, belanja negara (*government spending*) menjadi salah satu ujung tombak pemulihan permintaan agregat dan APBN menjadi alat stabilisasi ekonomi (*economic stabilizer*).

Kita harus memastikan optimalisasi serapan anggaran Penanganan Covid-19 dan akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional 2020 bisa terwujud, agar anggaran kesehatan, perlindungan sosial, bantuan UMKM dan sektor informal bisa sepenuhnya untuk membantu masyarakat, mendorong agar konsumsi dan daya beli masyarakat bisa segera pulih kembali. Oleh sebab itu, seluruh jajaran penyelenggara pemerintah harus bekerja keras. Kami bisa merasakan bahwa bekerja ditengah pandemi tidak mudah. Terdapat keterbatasan ruang gerak, termasuk keterbatasan personil serta daya dukung. Oleh sebab itu, alokasikan seluruh daya dan pikiran untuk mencapai *key performance indicator*, dengan berbasis pada *output*, *outcome*, dan hasil.

Beberapa sektor yang *potential winner* seperti sektor primer, antara lain: pertanian, perkebunan dan kelautan serta industri turunannya perlu terus diperkuat. Memperbaiki kinerja ekspor juga perlu ditingkatkan, meskipun tidak mudah tetapi peluangnya tetap ada, terutama sektor pangan, industrial alat kesehatan, sektor-sektor lainnya yang potensial. Terakhir, ada banyak pekerjaan

rumah yang harus kita selesaikan. Tidak ada manfaatnya untuk gaduh, songsong hari-hari dengan kerja.

Demikian Laporan Badan Anggaran DPR RI atas Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2021 untuk dapat diambil keputusan dalam Rapat Paripurna hari ini.

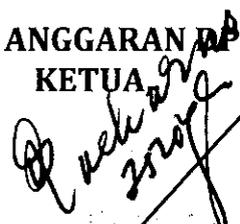
Kami atas nama Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Gubernur Bank Indonesia beserta jajaran, Pimpinan Dewan, Pimpinan dan Anggota Komisi I s.d Komisi XI, dan Pimpinan Fraksi atas kerjasamanya dalam pembahasan RUU APBN TA 2021. Tak lupa pula ucapan terima kasih kepada media massa yang telah menyebarluaskan hasil pembahasan ini kepada seluruh masyarakat. Juga ucapan terima kasih kepada Sekretariat Jenderal DPR RI, khususnya Sekretariat Badan Anggaran DPR RI yang telah memberikan dukungan penuh dalam pembahasan RUU ini hingga selesai.

Akhirnya, kami mohon maaf jika dalam penyampaian laporan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

**BADAN ANGGARAN DPR RI**  
**KETUA**



**MH. SAID ABDULLAH**  
**A-224**